



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Letjen Soeprapto No 06 Kuala Kurun. Kode Pos 74511  
Telepon (0537) 3032751, Fax (0537) 3032768

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**NOMOR : 000.1/5A/A/DINSOS/I/2025**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)**  
**PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS**  
**TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 diperlukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang nama dan pangkatnya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara No.3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara No. 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahn 2011



8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 23 tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Serta Standar Biaya Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2022
12. DPA - SKPD Dinas Sosial Tahun Anggaran 2025 Nomor : DPA/A.1/1/1.06.0.00.0.00.01.0000/001/2025 Tanggal 02 Januari 2025

Memperhatikan :

**SURAT KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS NOMOR 4 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEJABAT SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU, BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU, PEMBANTU BENDAHARA PENERIMAAN, DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025, TANGGAL 2 JANUARI 2025**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025.**

- KESATU :** Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat, Golongan dan Jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini untuk menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas.
- KETIGA :** Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan,
  - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan,
  - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan, baik dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran.
- KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025, Cq. Kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2025.

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Kurun  
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA DINAS,

**JHONSON AHMAD, S.E., M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196806051994031014

**TEMBUSAN** disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Gunung Mas di Kuala Kurun (sebagai laporan.)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
3. Inspektur Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
4. Kepala BKAD Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun.
5. Arsip



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS  
 NOMOR : 000.1/5-A/D/DSOS/11/2025  
 TANGGAL : 19 Januari 2025  
 TENTANG : PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN/JABATAN	NAMA KEGIATAN	NAMA SUB KEGIATAN	Kode Rekening	Pagu
1	HARPORI MELIASI, S.E NIP. 198008022009032006 PERATA TK.1 / III.4 PERENCANA AHLI MUDA	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.06.01.2.01.02 1.06.01.2.01.06	11.139.240 27.081.840
					38.221.080
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD	1.06.01.2.01.05 1.06.01.2.02.07	2.364.800 26.887.800
					29.252.600
<b>TOTAL</b>					
2	NONEGAE, S.P. NIP 19771192011012003 PERATA TK.1 / III.4 KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPENGAWALAN	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD 2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.06.01.2.03.06 1.06.01.2.02.01	1.916.000 5.779.464.165,38
					5.781.380.165,38
			3 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7 Penyediaan Bahan/Material 8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 9 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan/Perundang-undangan	1.06.01.2.06.01 1.06.01.2.06.02 1.06.01.2.06.04 1.06.01.2.08.05 1.06.01.2.08.05 1.06.01.2.06.09 1.06.01.2.05.11	5.678.500 126.114.870 45.848.000 20.413.000 26.378.000 275.127.200 51.038.280
		Administrasi Umum Perangkat Daerah			550.599.850

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.06.01.2.08.01	3.000.000
11		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.06.01.2.08.02	53.250.000	
12		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.06.01.2.08.04	44.521.968	
					100.771.968
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	1.06.01.2.07.01	868.101.030
		14	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.06.01.2.07.06	93.752.200
					961.853.230
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	15	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Lainnya	1.06.01.2.09.01	213.368.215
		16	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1.06.01.2.09.06	17.727.000
		17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	1.06.01.2.09.09	255.329.943
					486.425.158
	Penataan Organisasi	18	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	1.06.01.2.13.01	47.863.792
					47.863.792
					7.928.894.163
3	BEREN MARTINUS, ST.,M.Si NIP. 197903102005011014 PEMERINTAH / IV.a Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	TOTAL			
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	1.06.02.2.03.01 501.697.600
			2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	1.06.02.2.03.02 158.939.644
			3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.04 122.460.500



<div>4</div> <div>EVELLYN, SP NIP 197108082006042024 PEMBINA / IV.a KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL</div>	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	4	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.05.2.02.01	2.176.148.556				
					TOTAL				
					1	Penyediaan Permakanan	1.06.04.2.01.01	74.557.410	
					2	Penyediaan Sandang	1.06.04.2.01.02	20.184.500	
					3	Penyediaan Alat Bantu	1.06.04.2.01.03	77.043.150	
					4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	1.06.04.2.01.04	40.193.300	
					5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	1.06.04.2.01.05	17.067.200	
					6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan, Pengemis dan Masyarakat	1.06.04.2.01.06	13.767.600	
					7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	1.06.04.2.01.07	10.492.400	
					8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1.06.04.2.01.08	18.053.200	
					9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1.06.04.2.01.09	50.588.000	
					10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1.06.04.2.01.10	31.717.300	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	11	Pemberian Pelayanan Penelusuran keluarga	1.06.04.2.01.11	14.115.300				
		12	Pemberian Layanan Rujukan	1.06.04.2.01.12	53.735.124				
		421.514.484							
		1	Penyediaan Permakanan	1.06.04.2.02.03	38.563.250				
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA diluar Panti Sosial	2	Penyediaan Sandang	1.06.04.2.02.04	30.058.975				
		3	Penyediaan Perbekalan Kesehatan diluar Panti	1.06.04.2.02.06	15.056.608				
		4	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan Dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/ Kota	1.06.04.2.02.14	77.085.200				
		160.764.033							
TOTAL					582.278.517				

5	<b>ALMAE, S.PI.,M.Si</b> <b>NIP 197406012006012029</b> <b>FEMINA / IV.a</b> <b>Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial</b>				
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Slaga Bencana	1.06.06.2.02.02	143.129.700
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	2	Penyediaan Makanan	1.06.06.2.01.01	58.440.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	3	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1.06.05.2.02.02	60.552.000
		4	Fasilitasi Bantuan Kesejahteraan Keluarga	1.06.05.2.02.03	99.680.000
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1.06.02.2.03.03	182.070.200
<b>TOTAL</b>					<b>543.871.900</b>
<b>TOTAL</b>					<b>Rp 11.954.649.690,38</b>

Kuala Kurun, 15 Januari 2025

Kepala Dinas,

**JHONSON AHMAD, S.E.,M.Si**  
Pembina Utama Muda  
NIP 196806051994031014